

## Heru Budi: Pemrov DKI Siap Antar Warga Mudik ke Kampung Halaman

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau secara langsung kesiapan sarana dan prasarana transportasi ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, jelang arus mudik lebaran 2023/1444 Hijriah.

Dalam tinjauannya kali ini, Pj Heru Budi menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI siap mengantar para pemudik ke kampung halaman.

“Pemda siap untuk mengantarkan masyarakatnya kembali ke kampung halamannya,” ujar Pj Heru Budi di Terminal Kampung Rambutan, dikutip Senin (10/4).

Tak hanya itu, terlihat Pj Heru pun turut melihat kesiapan uji kelayakan kendaraan bermotor yang disediakan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Pj Heru Budi datang ke Terminal Kampung Rambutan pada pukul

17.05 WIB.

Adapun dalam kunjungan tersebut Pj Heru tak sendiri, ia turut didampingi jajaran seperti, Kepala Terminal Kampung Rambutan, Yulza Romadhoni; Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo; dan Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar.

Tak hanya itu, dalam kunjungan kali ini terlihat sejumlah menteri hingga Kakorlantas pun datang ke Terminal Kampung Rambutan seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri PMK, Muhadjir Effendy; dan Kakorlantas Polri, Irfan Pol Firman Shantayabudi.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengencakan pengecekan kepada bus-bus yang akan membawa penumpang ke kampung halaman saat mudik lebaran 1444 Hijriah.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya potensi kejadian yang tidak diinginkan saat arus mudik. ● yan

FOTO: ANT



### PRASETYO EDI MARSUDI DIPERIKSA KPK

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/4). Prasetyo diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.

## Bantah Kadishub, Heru Budi: Belum Ada Pembangunan Stasiun KRL JIS

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta era Gubernur Anies Rasyid Baswedan memiliki niatan membangun Stasiun KRL JIS. Stasiun yang berlokasi di utara Jakarta International Stadium (JIS) tersebut untuk mendukung mobilitas suporter yang ingin menonton pertandingan sepak bola di stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi terkait pembangunan stasiun Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, sampai saat ini masih belum ada pembangunan tersebut.

“Masih belum. Saya lihat dahulu dengan Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI. Kita lihat perencanaan dahulu,” kata Heru di Balai Kota, Jakarta

Pusat pada Senin (10/4).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Rasyid Baswedan memiliki niatan membangun Stasiun KRL JIS.

Stasiun yang berlokasi di utara Jakarta International Stadium (JIS) tersebut untuk mendukung mobilitas suporter yang ingin menonton pertandingan sepak bola di stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut.

Sayangnya, hingga kini, kabar pembangunan Stasiun JIS seperti tenggelam. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menjelaskan, pembangunan Stasiun JIS sampai saat ini masih berlangsung.

“Ya kan semuanya masih proses,” kata Joko kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin (10/4).

Saat disinggung berupa progres pembangunan Stasiun JIS, Jokowi hanya memberi jawaban singkat.

“Pembangunannya kan lagi ini. Ya lihat dong di sana,” kata Joko.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan Stasiun KRL JIS ditargetkan selesai pada 2024.

Menurut dia, jika stasiun itu sudah rampung dan beroperasi maka bisa memudahkan masyarakat untuk menuju JIS.

“Yang kami dorong adalah bagaimana penuntasan stasiun KRL terlebih dahulu. Saat ini sedang dibangun untuk stasiun sementara di JIS,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/2) lalu.

Menurut dia, pada tahap awal, dibangun stasiun semen-

tara. Kemudian, Stasiun JIS ditingkatkan menjadi ultimate dengan bangunan dan kapasitas yang lebih besar.

“Yang diharapkan pada tahun depan (2024) stasiun sementara ini bisa berfungsi paralel dengan itu akan ditingkatkan menjadi stasiun ultimate,” kata Syafrin. ● yan



FOTO: ANT

### RENCANA PENATAAN KAWASAN JAKARTA UTARA

Warga beraktivitas sambil menunggu berbuka puasa di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (9/4). Pemerintah Kota (Pemkot) Jakut akan melakukan penataan terhadap 31 kawasan yang terlihat semrawut sehingga kembali sesuai dengan fungsinya, diantaranya Taman Segitiga, Waduk Rawa Badak dan kawasan Taman Kota Waduk Pluit pada tahun 2023.

## Pemilik Mobil tak Bergarasi dan Parkir Sembarangan Bakal Disanksi

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan tengah membahas mengenai sanksi bagi pemilik mobil tak bergarasi yang parkir sembarangan di wilayah DKI Jakarta. Aturan tersebut nantinya dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

“Masih dibahas kerangka konsep untuk modelnya seperti apa. Masuknya Perda Nomor 5 Tahun 2014,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin (10/4).

Syafrin menyebut pihaknya telah melakukan pembahasan beberapa kali dalam merumuskan kejelasan penindakan terhadap masyarakat pemilik mobil yang tidak punya garasi dan parkir di jalan umum. Sejauh ini dia menegaskan telah melakukan langkah penderekan.

“Tentu kan kalau kendaraan tersebut parkir di badan jalan kita derek kena dana retribusi Rp 500 ribu per hari. Nah, untuk penerapan kepemilikan kendaraan bermotor empat harus memiliki garasi yang disertai dengan surat keterangan, saat ini sedang kami komunikasikan dengan teman-teman di Polda Metro Jaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, sejalan dengan pembahasan sanksi, pihaknya bersama Polda Metro Jaya juga akan melakukan langkah pendataan untuk menjerang para pemilik mobil yang tidak punya garasi. Hal itu dilakukan saat yang

bersangkutan melakukan perpanjangan STNK atau pajak dengan dimintai keterangan atau penjelasan mengenai ketersediaan parkir di rumah.

“Ini sedang dicari dasar agar ini bisa masuk ke dalam suatu prasyarat yang diminta pada saat masyarakat memperpanjang atau mengurus STNK baru,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140 tentang Transportasi secara umum baru mengatur mengenai warga yang memiliki mobil harus punya garasi, yang implementasinya masih meliputi imbauan.

“Untuk parkir liar, tentu untuk jaringan jalan arteri kolektor kita akan terus lakukan penertiban. Untuk jalan lingkungan jalan lokal, kami imbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan jalan-jalan yang ada untuk parkir,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/4) lalu.

Syafrin tidak membenarkan para warga, terutama pemilik mobil yang tidak memiliki garasi, memarkirkan kendaraan di jalan.

Dia menegaskan bahwa jalan merupakan fasilitas umum (fasum), sehingga jangan secara semena-mena menggunakanannya seolah seperti fasilitas pribadi.

“Ini tentu kami harapkan ada kesadaran masyarakat untuk mengadakan garasi. Iya (masih imbauan),” tutur Syafrin menegaskan. ● yan

## KPK Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Kasus Korupsi Lahan Pulo Gebang

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

“Pemeriksaan saksi tidak pidana korupsi terkait pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tahun 2018-2019,” kata Kabag Pemberitaan

KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/4).

Prasetyo tampak menggunakan kemeja putih. Dia langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberi keterangan.

“Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ali.

KPK mengatakan kerugian dari perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang itu diperkirakan mencapai ratusan

miliar rupiah.

Ali mengatakan KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan identitas tersangka tersebut.

“Kami pastikan saat proses penyidikan ini cukup kami akan umumkan siapa saja yang ditetapkan tersangka, termasuk konstruksinya dan kerugian keuangan negaranya berapa,” tutur Ali. ● yan



FOTO: ANTARA

### UNJUK RASA KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTIKORUPSI

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/4). Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh pengantar seperti Abraham Samad, Denny Indrayana, dan Saut Situmorang tersebut menuntut agar Ketua KPK Firlil Bahuri dicopot dari jabatannya serta meminta Dewan Pengawas KPK menyelidiki masalah pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

## Guru P3K Bekasi Sebut Wali Kota Tri Adhianto Zalim karena Potong TPP

BEKASI (IM) - Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi.

Mereka protes atas penurunan tunjangan pendapatan penghasilan (TPP) sekitar 75 persen tanpa ada kesepakatan dari P3K.

Koordinator aksi Guru P3K, Mulyono mengatakan aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk protes TPPnya dipotong oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Kami protes TPP kami turun bebas dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 1,5 juta,” kata Mulyono, Senin (10/4).

Mulyono mengatakan, Rp 1,5 juta itu masih dipotong untuk pajak dan karena ketidakhadiran guru karena sakit atau keperluan lain. Setiap bulannya guru P3K itu kadang menerima TPP-nya kurang dari Rp 1,5 juta.

“Belum lagi terpotong ketidakhadiran dan pajak. Jadi teman-teman kadang menerima Rp 1,3 juta,” kata.

Dia meminta potong TPP disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya yang TPP-nya mendapat potongan sebesar 3 persen setiap bulan-

nya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan P3K bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami inikan bagian dari ASN, ASN itu PNS dan P3K ketika ada kebijakan tentang TPP kami harus sama. Kalau PNS mendapatkan Rp 4,5 juta maka kami juga harus sama mendapatkan Rp 4,5 juta,” katanya.

Mulyono mengatakan, pemotongan TPP untuk P3K ini sudah terjadi sejak bulan Januari 2023. Pemkot Bekasi sempat berjanji pada bulan Maret akan menaikkan kembali potongan TPP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 3,5 juta.

“Katanya Maret yang turunnya April namun sampai sekarang belum ada. Bahkan sudah ada yang tanda tangan tetap Rp 1,5 juta,” katanya.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 10.49 WIB, ratusan guru terlihat semangat membentangkan poster pemberitahuan bahwa ASN itu PNS dan P3K dan tulisan Bekasi Keren TPP P3K Terjun Bebas Terdzolimi. Mereka berteriak kebijakan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono tidak punya perasaan.

“Wali Kota zalim tanpa perikemanusiaan,” demikian kata orator aksi di depan pintu gerbang. ● yan

### PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA SHARIA INDEX JII (“SYAILENDRA SHARIA INDEX JII”)

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi SYAILENDRA SHARIA INDEX JII (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA INDEX JII, dengan rincian sebagai berikut:

Pembubaran SYAILENDRA SHARIA INDEX JII dilakukan sehubungan dengan terpecahnya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Atas Peraturan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Atas Peraturan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang menyatakan bahwa SYAILENDRA SHARIA INDEX JII wajib dibubarkan apabila dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SYAILENDRA SHARIA INDEX JII memiliki total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), yang dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2023.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA INDEX JII kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA INDEX JII efektif per tanggal 11 April 2023.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA INDEX JII yang dibuat di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

**SYAILENDRA** Jakarta, 11 April 2023  
Manajer Investasi selaku likuidator  
**REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA SHARIA INDEX JII**  
PT Syailendra Capital  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan